# BAB I

# PENDAHULUAN

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan Kota Bandung merancang konsep *Smart City* upaya mengoptimalkan pelayan publik, dalam proses mensejahterakan rakyatnya, khususnya permasalahan kemacetan, karena berdasarkan kajian Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administasi Negara, Kebijakan Pemerintahan Dalam Mengatasi Permasalahan Lalu Lintas yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terkait aspek sosial, lingkungan dan budaya Kota Bandung dengan responden 100 orang masyarakat yang berada dan bermukim di Kota Bandung berkisar 5-10 tahun lebih di wilayah Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Coblong, Kecamatan Kiara Condong dan Kecamatan Lengkong menunjukkan bahwa kemacetan merupakan masalah yang paling kerap terjadi di Kota Bandung.

Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tahun 2015 mengklasifikasikan 9 faktor penyebab kemacetan di Kota Bandung secara berurutan yaitu (1) *political will* dan *political action*, (2) tata guna lahan, (3) kendaraan pribadi, (4) penegakan hukum, (5) gangguan samping (pemukiman dan pembangunan), (6) kondisi manajemen infrastruktur, (7) kondiisi jaringan, (8) psikologi masyarakat, (9) komuter, dan (10) kegiatan pariwisata. Selain itu, ada 7 faktor turunan yang paling berkontribusi terhadap kemacetan di Kota Bandung secara berurutan yaitu (1) kendaraan pribadi, (2) pembangunan perumahan, perdagangan dan pendidikan, (3) penyimpangan tata guna lahan, (4) *political willdan political* *action* kurang tegas dalam tata guna lahan, (5) *political will* dan *political* *action* kurang mendukung sarana dan prasarana transportasi publik, (6) tingginya aktiivitas ekonomi namun tidak merata, dan (7) transportasi publik yang tidak aman, tidak nyaman, tidak tepat waktu, dan tidak terintegrasi peningkatan jumlah kendaraan.

Kemacetan yang terus berlanjut akan menghabat Pemerintah Kota Bandung untuk mengoptimalkan pelayanan publik, membutuhkan suatu kebijakan pemerintah dalam melakukan proses perbaikan yang terarah, agar permasalahan kemacetan bisa di selesaikan dengan efesien dan efektif, selain itu kebijakan bisa membuka pintu pelayanan kepada masyarakat *‘public service”* di mana sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.

Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung mengenai Peraturan Daerah No 16 Tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan, dapat dinilai apakah sesuai strategi Pemerintah Kota Bandung upaya untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan di Kota Bandung.

Impelementasi kebijakan perihal kemacetan dan permasalahan kendaraan di Kota Bandung bisa melihat Peraturan Daerah No 16 Tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Perhubungan Dan Retribusi Perhubungan Kota Bandung pada Dinas Perhubungan Kota Bandung, khususnya dalam permasalahan jalan-jalan pesepeda di Kota Bandung dan *Bike Sharing* Kota Bandung yang menjadi hal yang penting dalam pelayan publik terhadap masyarakat Kota Bandung.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginka. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil.

Perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tangapan positif dari pada perubahan dratis rasional. Kedua, proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Ada yang menyarankan bahwa implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan reorganisasi secara drastis. Karena akan adanya perubahan kebijakan sesusai dengan struktural baru organisasi tersebut yang akan menjalankan kebijakannya.

Ciri penting lain dari kebijakan ialah tingkat konflik atau kosensus atas tujuan-tujuan dan sasaranya, ciri ini dilihat dari sejauh mana para pejabat yang melaksanakan kebijakan mempunyai kesepakatan terhadap tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran program. Konsensus mungkin tidak akan terjadi bila tindakan-tindakan yang berdasarkan nilai dari para pejabat dan pemimpin menjadi faktor yang paling menentukan bagi kebijakan akhir.

Konsep *Bike Sharing* yang di usulkan oleh komunitas Bandung *Creative City Forum* ialah merupakan salah satu sistem transportasi sehat ‘*Green Transportation”*yang sangat bagus karena sebagai salah satu solusi bertransportasi untuk Kota Bandung, selain mengurangi kemacetan, *Bike Sharing* mengajarkan kemadirian bertranportasi kepada masyarakat, masyarakat diajarkan untuk tidak konsumtif terhadap perusahaan-perusahaan kapitalisme yang memperjual belikan kendaraan bermotor yang membludak yang akhirnya menimbulkan kemacetan, khususnya di daerah Kota Bandung. Jelas bahwa kebijakan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Perhubungan dan Retribusi Perhubungan ini sangat mendukung Masyarakyat Kota Bandung untuk kesejahteraan mereka serta merupakan kebijakan yang efisien untuk digunakan dalam tata ruang perkotaan hijau menuju kepada sistem *Smart City* yang ingin diterapkan oleh Kota Bandung.

Pembukaan konsep *Bike Sharing* sangat bagus dan banyak digunakan oleh masyarakat Kota Bandung, selain fasilitas yang bagus, sehat serta murah *Bike Sharing* juga menjadi pilihan bagi masyarakat di sekitar kawasan Kelurahan Tamansari Bandung, karena salah satu *shelter* sepeda *Bike Shareing* ada di kawasan tersebut.

 Gambar 1.1 Pembukaan *Bike Sharing* Kota Bandung

Lokasi : Jalan Ganesa No 10

Sumber : [http://bikebdg.com](http://bikebdg.com/)

Gambar di atas menujukan awal pembukaan konsep *Bike Sharing* yang dibuka oleh mantan Walikota Bandung, Bapak Dada Rosada dan Bapak Ridwan Kamil sebagai salah satu angota dari Komunitas Bandung *Creative City Forum*. Konsep *Green Transportation* yang di tawarkan oleh *Bike Sharing* Bandung sangat diminati oleh mayarakat Kota Bandung.

 Sepeda bisa digunakan saat acara *Car Free Day* setiap hari minggu berlangsung oleh masyarakat di Kota Bandung serta kebijakan ini bisa mempengaruhi indikator kebahagian Kota Bandung, implementasi kebijakan yang sangat bagus bisa digunakan sebagai contoh bagi daerah-daerah lain di wilayah Negara Indonesia untuk menjalankan kebijakan Tata Ruang Kota dalam pelayan publik.

Tata pelaksanaan *Bike Sharing* Kota Bandung belum berjalan secara optimal dari data yang peneliti dapatkan di lapangan terdapat masalah-masalah di lapangan yang menunjukan tidak terawatnya *shelter-shelter* sepeda serta sepeda yang berada di *shelter* *Bike Sharing*.

Gambar 1.2 *Bike Sharing* Kota Bandung

 Lokasi : Jalan Ganesa No 10

Hasil gambar di atas membuktikan kurang terawatnya *shelter-shelter* sepeda di Kecamatan Tamansari, Kawasan Kampus Institut Teknologi Bandung yang mengakiabtkan sepeda tidak bisa digunakan untuk fasilitas masyarakat di sekitar wilayah tersebut. *Bike shareing* Kota Bandung ialah salah satu kebijakan Daerah yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Perhubungan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, dalam Peraturan Daerah tersebut tertuliskan di pasal 12 mengenai perlengkapan jalan, disebutkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan salah satunya berupa fasilitas sepeda.

Pemerintah Daerah dapat membangun fasilitas pesepeda berupa lajur khusus sepeda dan shelter sepeda. Di mana Kota Bandung ialah Kota yang mengusung konsep *Smart City* harus memiliki *green transportation* untuk mendukung kebijakan tersebut. Pemerintah Kota Bandung harus memenuhi fasilitas yang ada karena telah ditulis dalam Peraturan Daerah dan sesuai dengan rencana strategi yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan ialah salah satu faktor penting dalam usaha organisasi khususnya Pemerintah untuk mencapai suatu keberhasilan mensejahterakan rakyatnya, menurut Van Metter dan Van Horn dalam bukunya Agustino, Dasar-dasar kebijakan publik ada enam variabel yang membentuk ikatan perihal imlementasi kebijakan, 1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. Varibael ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyelutuh. 2 Sumber-sumber kebijakan Sumber- sumber kebijakan layak dapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. 3 Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertangung jawab dalam pencapaian kebijakan.

Ketepatan komunikasi dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang di komunikasikan dengan berbagai sumber informasi. 4 Karakteristik badan-badan pelaksana Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasikan banyak karakteristik badan-badan administrasi yang telah mempengarui pencapaian kebijakan mereka, struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

 Kompetensi dan ukuran staf suatu badan tingkat pengawasan hirarkis Sumber-sumber politik suatu organisasi, Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka ,Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan., Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik Dampak ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu.

Para peminat perbandingan politik negara dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasikan pengaruh variabel-variabel lingkungan hasil-hasil kebijakan. 6 Kecenderungan pelaksaan *Implementors* Pada tahap ini pengalaman-pengalaman subjektifitas individu memagang perat yang sangat besar karena pendapat-pendapat individu di saring, persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tangapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mekera untuk melaksanakan kebijakan, yakni kognisi (komprensif, pemahaman) tentang kebijakan, seperti tangap terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tangapan itu.

 Tanpa adanya kebijakan yang baik serta kebijaksanaan untuk kemajuan Kota Bandung menjadi kota *smart city* sulit kiranya tujuan-tujuan pemerintah dapat tercapai. Tetapi dalam kenyataannya ada beberapa *rute-rute* jalan pesepedah di Kota Bandung yang masih belum layak untuk pesepedah yang mengunakan *Bike Sharing* maupun pengendara sepedah beraktifitas mengunakan sepedah, serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebijakan *Bike Sharing* Kota Bandung menyebabkan masyarakat hanya mengunakan sepeda pada saat acara *Car Free Day* setiap minggu, padahal konsep *Bike Sharing* yang diusulkan oleh Komunitas Bandung *Creative City Forum* sangat baik bila digunakan oleh masyarakat, masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas *Bike Sharing* ini kemungkinan besar timbul kemandirian yang tinggi, dalam hal bertranportasi khususnya di Kota Bandung.

Hal ini yang akan menjadikan kota sehat dan aktif menjadi contoh bagi masyarakat seluruh Indonesia yang akan menimbulkan kemajuan yang tinggi menuju konsep politik Bandung juara di mana Kota Bandung menjadi salah satu daerah percontohan yang sangat baik dalam menjalankan peran kebijakannya khususnya dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Perhubungan dan Retribusi Perbungan. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan-permasalahan yang terjadi, untuk itu peneliti mengambil judul :

**“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Perhubungan Pada Dinas Perhubungan Kota Bandung”
“Studi Kasus Pelaksanaan *Bike Sharing* Di Kelurahan Tamansari”.**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Upaya-upaya apa yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk mengatasi permasalahan terkait pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Perhubungan dan Retribusi Perhubungan Kota Bandung
2. Hambatan-hambatan apa saja yang berada di Dinas Perhubungan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Perhubungan dan Retribusi Perhubungan Kota Bandung ?

**1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

**1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Berusaha menemukan data dan informasi mengenai permasalahan *Bike Sharing* di Kota Bandung khususnya bagi masyarakat di Kelurahan Tamansari.
2. Berusaha menerapkan data dan informasi mengenai kebijakan pemerintah tentang *Bike Sharing* dalam Peraturan Daerah No 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Perhubungan, yang di laksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung.
3. Berusaha mengembangkan data dan informasi mengenai *Bike Sharing* Kota Bandung serta dampak bagi masyarakat di Keluruhan Tamansari.

**13.2 Manfaat penelitian**

 Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Akademis.

Dengan mengetahui implementasi Kebijakan prihal Peraturan Daerah No 16 Tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Perhubungan di Kota Bandung yang berhubungan dengan pengetahuan dalam bidang Adminstrasi dan Manajemen.

1. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengambil kebijakan di daerah maupun kota mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat daerah maupun pemerintah.

**1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian**

**1.4.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di dua tempat, tempat pertama di Dinas Perhubungan Kota Bandung, Jalan Soekarno Hatta No 205 serta di Kecamatan Tamansari kawasan kampus Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesa No 10.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan adalah hal yang sangat penting dalam mengembangkan kemajuan suatu daerah, dengan kebijakan yang di buat suatu daerah bisa berkembang dan maju menuju tujuan yang dinginkan sesuai dengan Rencana Strategi yang di buat di setiap daerah masing – masing di Indoensia.

Pengertian Kebijakan menurut Anderson (2008:8) dalam bukunya Agustino, Dasar-dasar kebijakan publik yaitu sebagai berikut :

Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Pengertian Implementasi Kebijakan menurut Eatson (2008:8) masih dalam bukunya Agustino, Dasar-dasar kebijakan publik, yaitu sebagai berikut :

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.

Dapat diartikan bahwa kebijakan ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui beberapa proses yang sistematis, terstruktur, dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah maupun organisasi swasta dalam menentukan arah tujuan yang diinginkan sesuai dengan rencana suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

**2.2 Aktor dan Pelaku Pembuat Kebijakan**

Kebijakan tidak datang dengan sendirinya, tetapi melalui seorang yang memikirkan tentang suatu hal untuk kemajuan dan kebaikan bagi manusia lainya, maka jelas kebijaakan dilakukan oleh aktor-aktor tertentu dan sekelompok aktor tertentu agar kabijakan bisa berjalan dengan sistem yang diingginkan sesuai dengan tujuan yang telah direncakan.

Menurut Agustino (2008:29) dalam bukunya Dasar-dasar kebijakan publik, Pelaku pembuat kebijakan ialah :

Legislatif sebagai penetapan keputusan politik menjadi kebijakan publik merupakan sesuatu yang harus ditentukan melalui rangkaian kegiatan empiris yang runut dan sistematis. Eksekutif sebagai struktur pembuatan kebijakan di Negara-Negara berkembang selaku pembuat kebijakan. Intansi Administratif mendukung sistem politik yang berbaur dengan dengan pengembangan kebijakan publik. Lebaga Peradilan yang memainkan peranan besar dalam pembentukan kebijakan selain Amerika Serikat dan Eropa Barat.

Lembaga-lembaga diatas memainkan tugas yang penting dalam pembuatan kebijakan, bagaimana mereka merencanakan kebijakan sesuai dengan lapangan yang ada, karena jika kebijakan dibuat tetapi tidak sesuai dengan lapangan maka akan sulit rasanya kebijakan dilaksanakan, pentingnya beberapa lembaga diatas dalam pengambilan keputusan upaya proses pengambilan kebijakan yang sesuai dengan pelayanan publik yang sudah seharusnya dilakukan oleh Pemerintah.

**2.3 Formulasi Kebijakan**

Hal terpenting dalam proses kebijakan ialah formulasi (perumusan) kebijakan, dengan adanya formulasi kebijakan adalah bagaimana para analis kebijakan dapat mengenal masalah-masalah publik dan dapat membedakan dengan masalah-masalah privat. Bagaimana hakikat permasalahan publik dan tigas aspek pembentukan kebijakan publik.

Menurut William Dunn, formulasi kebijakan (1999:26) dalam bukunya Agustino, Dasar-dasar kebijakan publik yaitu sebagai berikut :

Perumusan masalah sangat embantu para analis kebijakan dalam menentukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebagian-penyebagian masalah publik, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan meadukan pandangan-pandangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

Sedangkan menurut Charles O’ Jones (1996:119) Mengatakan formulasi kebijakan dalam bukunya Pengantar Kebijakan Publik yaitu sebagai berikut :

Formulasi kebijakan dapat melihat jumlah dari masalah yang ditangani, apakah usulan kebijakan akan menyampaikan seluruh masalah dalam suatu lingkup masalah ataukah perhatiannya akan ditunjukan kepada kenyataan yang ada, lingkupan analisis akan menyelesaikan aspek-aspek masalah dan memperkirakan dampak yang terjadi dengan pengujian kebijakan yang akan dibuat.

Serangkaian proses dalam formulasi kebijakan jelas sangat di perlukan oleh pemerintah agar terlaksanakanya kebijakan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, tetapi proses-proses yang ada harus diikuti dengan sistematis dan komprehensif agar terjalin kinerja yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan yang akan menimbulkan kenyataan dan diterima oleh masyarakat sebagai pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah.

|  |
| --- |
| Meta Masalah |

Pencarian Masalah

Pendefinias Masalah

|  |
| --- |
| Situasi Masalah |

|  |
| --- |
| Masalah Subtantif |

Pengenalan Masalah

Spesifikasi Masalah

|  |
| --- |
| Masalah Formal |

Gambar 2.1 Fase-fase Perumusan masalah

**2.4 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik, suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Pengertian Implementasi Kebijakan menurut Jones (1997:51) yaitu sebagai berikut :

Implementasi kebijakan merupakan proses mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya (*those activities directed toward putting a program into efeect*).

Pengertian Implementasi Kebijakan menurut Edward (2012:84) dalam bukunya Agustino Dasar-dasar Kebijakan Publik yaitu sebagai berikut :

*Policy implementation, as we have seen, is the satage of policy making between the estabilisment of a policy – such as the passage of legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judical decision or the promulgation of a regulatory rule – and the concequences of the policy for the people whomit effects.*

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan suatu kebijakan seperti keputusan – keputusan yang dibentuk dalam sebuah undang – undang yang dilakukan oleh legislatif (parlemen), atau peraturan yang dikeluarkan oleh eksekutif, maupun peraturan yang diloloskan oleh yudikatif (peradilan atau mahkamah), kebijakan publik yang dikeluarkan tersebut dapat memberikan suatu konsekuensi bagi masyarakat dalam beberapa aspek tatanan kehidupan.

 Penegertian Implementasi Kebijakan Menurut Alfatih (2010:15) yaitu sebagai berikut :

Menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah penerapan apa yang diamanahkan oleh suatu kebijakan secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Menurut *Meter* dan *Horn* yang dikutip Agustino (2006:140) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Jelas dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan ialah serangkaian proses sistematis yang dilaksanakan oleh individu-individu di dalam kelompok organisasi pemerintah maupun swasta untuk menajalan pengambilan keputusan agar kebijakan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan di rumuskan.

Jenis – jenis kebijakan publik menurut Nugroho yang dikutip oleh Harbani Pasolong (2013:40) menyatakan kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

(1) Kebijakan yang bersifat makro, kebijakan atau peraturan yang bersifat umum, (2) Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Mentri, Peraturan Gubernur,Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota. (3) Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang diatasnya, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Mentri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Berdasarkan teori diatas maka implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan setelah kebijakan ditetapkan / disetujui oleh pembuat kebijakan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pelaksana baik individu maupun pejabat ataupun kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam isi kebijakan itu.

Model implementasi kebijakan yang bersepektif top down di kembangkan oleh Edwars III. Edwars III menaman model implementasi kebijakan publiknya dengan direct and direct impact on implementation. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat varible yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

Variabel pertama yang mempengaruhi implementasi kebijakan, menurut George C. EdwardIII dalam bukunya Agustino Dasar-dasar Kebijakan Publik yaitu sebagai berikut :

Komunikasi, menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditramisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi (atau pentranmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal yang penting lainnya, Menurut Edward III indikator sumber-sumber daya terdiri beberapa elemen, yaitu :

* 1. Staff, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, tetapi diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan
	2. Staff, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementator saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
	3. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Variabel keempat, adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terrealiasasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

 Empat variabel diatas menentukan alur implementasi kebijakan agar sesuai dengan rancana yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi swasta, Komunikasi bisa memudahkan jalan kordinasi untuk melihat berjalan atau tidaknya suatu kebijakan yang dibuat, serta Sumberdaya seperti staff yang bisa mengerjakan atau menjalankan kebijakan setelah direncakan dan mengumpulkan informasi dari lapangan atau kejadian-kejadian yang terjadi stelah kebijakan dibuat.

Membutuhkan peranan disposisi dalam menjalankan kebijakan sangat diperlukan agar kebijakan yang telah dibuat tidak menjadi bias atau tidak berjalan dengan semestinya dan yang terahkhir dalam variable diatas agar kebijakan bisa berjalan dengan baik ialah struktur birokrasi karena dalam struktur birokrasi terdapat system tangung jawab yang kuat, dengan demikian jelas bila kemungkinan kebijakan tidak berjalan maka ada anggota dari structural yang salah dan tidak menjalankan peran/fungsi tugasnya.

**2.5 Fungsi Manajemen**

Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi manajemen yang dikemukakan George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan akan dibahas lebih terperinci lagi.

**2.5.1 Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan merupakan fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing*, *staffing*, dan *controlling* harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif-alternatif yang ada.

Pengertian perencanaan menurut G.R Terry yaitu sebagai berikut :

Perencanaan (*planning*) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperukan unruk mencapai hasil yang diinginkan.

Lebih lanjut lagi dari Irawan (1997:102) menyebutkan perencanaan sebagai berikut :

* Perencanaan membimbing para pengambil kebijakan untuk menentukan berbagai program dan kegiatan yang secara ketat berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
* Perencanaan membimbing para pengambil keputusan untuk berpikir secara sistematis dan secara terkoordinasi dengan baik dengan seluruh unit di dalam organisasi.
* Perencanaan akan menghindarkan para pengambil keputusan melakukan perubahan (improvisasi) dalam berbagai program kegiatan secara coba-coba , tidak rasional dan subjektif.
* Perencanaan pembimbing para pengambil keputusan untuk mendistribusikan beban kerja secara adil, merata dan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab pegawai.
* Perencanaan menuntut komitmen dari semua pihak untuk melaksanakannya, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai.

Perencanaan senantiasa berpijak pada kenyataan yang ada sehingga sasaran yang ingin dicapai benar-benar dapat terwujud. Dari uraian teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan dari organisasi atau perusahaan.

Proses perencanaan dapat disusun dari tiga segi, dengan perkataan lain bahwa fungsi perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik melalui 3 cara. Cara-cara tersebut yang *pertama*, mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri suatu rencana yang baik. Setelah ciri-ciri itu diketahui lalu diusahakan agar rencana yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. *Kedua*, memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan memuaskan. *Ketiga*, memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Dalam menerapkan prinsip-prinsip pemecahan masalah dengan teknik ilmiah, pimpinan dapat pula menciptakan suatu rencana yang baik, dengan perkataan lain pembuatan suatu rencana dapat dipandang sebagai suatu masalah yang harus terpecahkan dengan sistematis.

**2.5.2 Pengorganisasian**

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari Manajemen, dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk unsur manusia sehingga tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan kata kerja dari organisasi yang berasal dari kata “*Organism”.* Organism berarti suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagaian yang diarahkan ke satu tujuan. Atau suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang dipadukan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu dengan yang lainnya saling mengikat dan secara keseluruhan merupakan kebulatan yang saling berhubungan, bergantung, saling mempengaruhi dan bekerja untuk satu tujuan tertentu.

Penegertian organisasi Menurut G.R Terry (1999:82) yaitu sebagai berikut :

pengorganisasian adalah pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerja, penentuan hubunga-hubungan pekerjaan diantara mereka dan memberikan lingkungan pekerjaan yang sepatutnya.

Pengorganisasian merupakan fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manajer pada semua tingkatan dan jenis kegiatan dan bentuk organisasi, besar atau kecil, bisnis atau negara. Fungsi pengorganisasian dalam manajemen penting sebab:

* Mewujudkan struktur organisasi
* Uraian tugas dari setiap bidang atau bagian dalam organisasi menjadi jelas.
* Wewenang dan tanggung jawab menjadi jelas.
* Memperlihatkan antar tugas atau pekerjaan dari setiap unit organisasi.
* Sumber daya manusia dan materiil yang dibutuhkan dapat diketahui.

Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dan dapat dikerjakan secara bersama.

Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan. Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suattu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi dapat dicapai dengan efisien. Ada beberapa aspek penting dalam proses pengorganisasian yaitu

1. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai,

2. Pemahaman tujuan oleh para anggota organisasi,

3. Penerimaan tujuan oleh para anggota organisasi,

4. Kesatuan arah,

5. Kesatuan perintah,

6. Fungsionalisasi,

7. Deliniasi berbagai tugas,

8. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab,

9. Pembagian tugas,

Proses pengorganisasian terdiri dari tiga tahap, yaitu :

1. Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap individu dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Pembagian beban pekerjaan yang menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logika dapat dilaksanakan oleh setiap individu. Pembagian kerja sebaiknya tidak terlalu berat sehingga tidak dapat diselesaikan, atau terlalu ringan sehingga ada waktu menganggur, tidak efisien dan terjadi biaya yang tidak perlu.

3. Pengadaan dan pengembangan mekanisme kerja sehingga ada koordinasi pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Mekanisme pengorganisasian ini akan membuat para anggota organisasi memahami tujuan organisasi dan mengurangi ketidak efisiensian dan konflik.

**2.5.3 Pelaksanaan (*Actuating*)**

Pelaksanaan penggerakan di dalam manajemen merupakan fungsi yang paling penting karena berkaitan langsung dengan memanfaatkan sumber daya manusia. Penggerakan adalah mennggerakkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.

Masalah penggerakan/pelaksanaan sangat berkaitan dengan manusia dan merupakan suatu masalah yang paling kompleks. Dengan demikian dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, pelaksanaan merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan.

Pengertian pelaksanaan menurut G.R Terry (2005:41) yaitu sebagai berikut
 :

Membuat semua anggota kelompok agar mau bekrja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi.

Pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie (1989:210) yaitu sebagai berikut :

Usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulai.

Lebih lanjut Tjokroamidjojo (1995:98) mendefinisikan pelaksanaan sebagai berikut :

Suatu proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni yang berawal dari kebijaksanaan guna mencapai suatu tujuan maka kebijaksanaan diturunkan dalam program.

 Pelaksanaan jelas sangat berkaitan dengan sumber daya manusia, karena bagaimanapun tata pelaksanaan dilapangan ialah manusia sendiri sebagai intrumen dari kebijakan.

**2.5.4 Pengawasan *(Controlling)***

Tiitik tolak yang digunakan utnuk membahas pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemn ialah definisi yang mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga manajer rendah yang secara langsng mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional.

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung ialah apabila pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan terhadap laporan yang disampaikan oleh bawahan, laporan ini dapat berbentuk lisan maupun tulisan.

Pengertian pengawasan menurut Riwu Kaho (1996:79) yaitu sebagai berikut :

Pengawasan adalah pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan apa saja yang telah dilaksanakan agar pekerjaan itu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengertian pengawasan menurut Harold Koontz (2005:241) yaitu sebagai berikut :

Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

Sedangkan menurut G.R Terry (2005:242) mengemukakan bahwa pengawasan adalah :

Sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

 Dalam buku Siagian yang berjudul Fungsi-Fungsi Manajerial (200:145) pengawasan yang terjadi dalam lingkungan pemerintahaan dibagi menjadi 4 tetapi untuk dalam penelitian hanya digunakan (dua) jenis pengawasan saja yaitu

* Pengawasan Melekat

Dalam pengawasan melekat, pelaku pengawasan adalah atasan yang dianggap memiliki kekuasaan *(power)* dan dapat bertindak bebas dari konflik kepentingan *(confict of interest).*

Dengan demikian pengawasan langsung dilakukan oleh seorang pemimpin organisasi terhadap kegiatan yang sedang dijalankan dimana efektivitas manajerial seseorang yang menduduki jabatan pemimpin sangat tergantung pada kemampuannya melakukan pengawasan melekat disamping kemampuannya menyelenggarakan berbagai fungsi manajerial lainnya.

* Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional bisa dilakukan oleh aparat pengawasan yang terdapat dalam satu instansi tertentu. Pengawasan fungsional adalah merupakan setiap upaya pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang ditunjuk khusus untuk melakukan audit secara independen terhadap objek yang diawasinya. Aparat pengawasan fungsional tidak hanya bertugas sebagai pemeriksa, akan tetapi juga dapat melakukan tugas yang lain seperti verifikasi, konfirmasi, survey dan penilaian *(assessment).* Pengawasan fungsional dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

Pengawasan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya seminimal mungkin dapat dihindari segala ketimpangan dari apa yang telah disusun sebelumnya. Hasibuan menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah ada 4 fungsi pengawasan sebagai berikut :

1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengawasan;

2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang dicapai;

3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada;

4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu: pengawasan langsung *(direct control)* dan pengawasan tidak langsung *(indirect control).* Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang pemimpin. Penanganan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, *on the spot observation* dan *on the spot report*. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas seorang pemimpin terutama dalam organisasi yang besar maka seorang pemimpin untuk tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung sehingga pemimpin sering pula melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung. Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan dapat berbentuk tertulis maupun lisan.

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan/instansi diperlukan aparat yang berkompetensi dibidangnya sehingga dalam pelaksanaan nantinya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan yang dibuat.

Yang dimaksud pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung yang terfokus pada penataan *shelter-shelter bike sharing* di Kota Bandung

**2.6 Dinas Perhubungan Kota Bandung**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka Dinas Perhubungan Kota Bandung mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dareah dalam melaksanakan sebagaian kewenangan daearah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Bandung mempunyai tugas pokok diantaranya adalah :

2.4.1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan.

2.4.2. Melaksanakan tugas teknis oprasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas dan Parkir, Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana dan Teknis Oprasional berdasarkan peraturan Undang-Undang Nasional yang berlaku.

 **2.7 Konsep Smart City**

*Smart City* ialah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Beberapa ahli berpendapat konsep kota dengan mengunkan *smart city* dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kesehatan manusia di zaman modern seperti sekarang ini, walaupun dalam kenyataannya konsep *smart city* masih diperdebatkan oleh para ahli dan beberapa ahli akhirnya berpendapat tentang konsep *smart city* dengan pendapat masing-masing dengan otoritas ilmu masing-masing yang mereka miliki.

Menurut Kourtit dan Nijkamp (2012) *Smart City* adalah :

*Smart City* merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategis kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota. Kemunculan smart city merupakan hasil dari gabungan modal sumber daya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal sosial (contohnya jaringan komunitas yang terbuka), dan modal enterprenerial (contohnya aktifitas bisnis kreatif). Pemerintah yang kuat dan dapat dipercaya disertai dengan orang-orang yang kreatif dan berfikiran terbuka akan meningkatan produktifitas lokal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu kota.

Menurut Chon Boyn (2013) Smart City adalah :

*Smart City* (Kota Pintar) ialah sebuah pendekatan yang luas, terintergrasi dalam meningkatkan efesiensi pengoprasian sebuah kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya dan menumbukan ekonomi daerahnya.

Sedangkan menurut Ahmad Numan Smart City adalah :

Kota Cerdas atau smart city, pada umumnya didasarkan pada tiha hal, pertama faktor manusia, kota dengan manusia kreatif dalam pekerjaan, jejaring pengetahuan, lingkungan yang bebas dari kriminal. Kedua faktor teknologi, kota yang berbasis teknologi kamonukasi dan informasi. Terakhir faktor kelembagaan, masyarakat kota (pemerintah, kalangan bisnis dan penduduk) yang memahami teknologi informasi dan membuat keputusan berdasarkan pada teknologi informasi.

Sedangkan menurut Giffinger *Smart City* adalah :

*A smart city is a city well performing built on the “smart” combination of endowment and activites of self-decisive, independent and aware citizen.*

*Smart City* disusun dari dua kata city atau kota dan smart atau pintar. City atau kota dapat diartikan pemukiman yang berpenduduk relatif besar, luas areal terbatas, pada umumnya bersifat nonagraris, kepadatan penduduk relatif tinggi, tempat sekelompok orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tingal dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomi dan idividual. Sedangkan Smart sendiri berarti pintar yang dapa diartikan *showing mental alertness and calculation an resourcefullnes, elegant and stylish, quickness and ease in learning, quick and birsk, capable of independent and apperently intelegent action*. Pada imtinya konsep smart city ialah mengabungkan 3 unsur, infrastruktur fisik, infrastruktur sosial dan infrasrtuktur ekonomi dengan teknologi. Yang dapat mengintergrasi kota menjadi lebih efesien dan efektif kedepannya, dan hsail tersebut akan memudahkan masnusia dalam menajani kehidupan kesehariannya.

**2.8 Konsep *Bike Sharing***

*Bike sharing* merupakan suatu sistem peminjaman sepedah yang mudah terjangkau dan bisa memfasilitasi masyarakat perkotaan dengan biaya murah, sistem ini berjalan dengan konsep ‘*green transportations’* yang diterapkan oleh kota-kota besar di dunia seperi di Negara Spanyol Kota Barcelona sudah mengunakan sistem *Bike Sharing* ini, Negara German di Kota Munchen sudah mengunakan sistem *Bike Sharing* dan *Bike Sharing* yang akan membawa Kota Bandung.

Menurut Tolley (2009) sepedah ialah :

Sepeda merupakan salah satu moda transportasi *non-motorized* yang dapat mendukung konsep *sustainable transportations*, dengan konsep hijau yang ideal untuk melakukan perjalanan dari sudut pandang konservasi energi, ramah lingkungan dan kesejateraan lingkungan.

Sedangkan menurut Jeffery (2001)Tumlin sepedah ialah :

Bersepeda merupakan salah satu moda transportasi paling efesien dalam pengunaan energi, hal ini terlihat dari energi metabolisme yang diwujudkan ke dalam gerakan. Selain itu bersepedah juga mendukung keberlanjutan dari sisi ekologis, sosial dan ekonomis.

Sedangkan menurut Nelson dan Allen bike sharing ialah :

Tingginya tingkat ketersediaan fasilitas sepedah memiliki kolerasi positif dengan tingginya pengunaan tingkatan commuting. Ketersediaan fasilitas sepeda dapat mendorong orang untuk mengunakan fasilitas tersebut seperti lajur sepeda “*on street”* atau “*off street bicycle paths*” dan fasilitas parkir.

Jelas menurut teori diatas bahwa *Bike Sharing* ialah sebuah fasilitas penyediaan sepeda yang bersih, rapi dan mengunkan biaya murah untuk fasilitas kendaraan yang sehat untuk masyarakat, serta sebagai bahan olahraga untuk masyarakat perkotaan yang jarang sekali berolahraga karena sibuk berkerja, dengan adanya konsep *Bike Sharing* yang diterapkan oleh suatu Negara sudah menjadi kota yang Smart City dalam Negara tersebut, karena konsep ini ialah konsep besar dengan kedewasaan Pemerintah dengan kreatifitas yang luar biasa dalam menjalankan sistem ‘*Green Transportation’* i

**BAB III**

**OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

**3.1 Objek Penelitian**

**3.1.1 Gambaran Umum Kota Bandung.**

Panjang keseluruhan jalan di Kota Bandung adalah 1236,48 km, hanya sekitar 4,9 % dari luas Kota Bandung. pada mulanya jalan sepanjang itu di peruntukan untuk menampung sekitar 360 ribu roda empat. Pada saat ini ada sekitar 1,2 juta kendaraan, terdiri dari 359.714 roda empat dan 859.411 roda dua dengan pertumbuhan sekitar 11 % (2003-2010). Kendaraan yang masuk Bnadung via tol tiap hari mencapai 15.572 dan yang keluar kota Bandung mencapai 12.466 per hari. Sebagai kota tujuan wisata belanja, kuliner dan wisata lainnya, pada waktu libur yaitu hari sabtu, minggu serta hari-hari besar lainnya, kota Bandung banyak dipadati oleh kendaraan yang masuk kota Bandung pada hari-hari libur.

**Gambar 3.1**

**Peta Batas Teritorial Kota Bandung**

**3.1.2 Gambaran Dinas Perhubungan Kota Bandung.**

Dinas Perhubungan Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daearah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2001 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas daearah dan lingkungan Pemerintahan Kota Bandung. Sebelum berubah menjadi dinas perhubungan nomenklatumnya adalah sebagai Dinas lalulintas dan angkatan dan angkatan jalan provinsi daearah tingkat I Jawa Barat cabang kotamadya daearah tingkat II bandung, sampai 1997, dari tahun 1997 sampai dengan 2001 di rubah menjadi Dinas Lalu Lintas daearah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 1997 tangal 1 april 1997 tentang pembentukan Dinas Lalu lintas dan Angkatan Jalan Kotamadya daerah tingkat II Bandung dan sejak 2001 sampai dengan sekarang menjadi Dinas Perhubungan Kota Bandung.

**3.1.3 Visi dan Misi Dinas pehubungan Kota Bandung.**

Visi Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah untuk mewujudkan sistem trasportasi kota yang lebih baik untuk mendukung Kota Bandung sebagai kota yang unggul, nyaman dan sejatera. Adapun misi dari Dinas Perhubungan Kota Bandung ialah :

1. Menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, terteib dan terkendali.
2. Menyediakan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman.
3. Menyediakan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.
4. Meningkatkan profesionalsime aparat Dinas Perhubungan Kota Bandung.

**3.1.4 Struktur rganisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai berikut:

Kepala Dinas

Ir. Didi Ruswandi, MT.

III

I

Sekretaris

Dr.H Enjang Mulyana, MS.i

Sub bagian keuangan

dan program

Drs. Hassanudin, S,Sos,.MM

Sub Bagian Umum

dan kepegawaian

Drs. Makmur Situmorang, MS.i

Bidang

operasional

Bidang sarana

Bidang

angkutan dan

terminal

Bidang

lalulintas dan

parkir

Kelompok

jabatan

fungsional

Seksi penataan

dan pengendalian

Seksi pengujian

kendaraan

Sesi bina

angkutan

Sesi tata

teknik

Seksi bina lalu

lintas

Seksi

pembengkelan

Seksi tata

teknik

terminal

Seksi

manajemen &

rekayasa lalu lintas

UPTD

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung

**3.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung.**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung berdasaran Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2001 adalah membantu kepala daerah dalam melaksanakan sebagai kewenangan daerah dibidang perhubungan lingkungan pemerintah Kota Bandung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi dari petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung antara lain :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang perhubungan.
2. Melaksanakan kegiatan teknis oprasional dibidang perhubungan, yang meliputi : teknis prasarana, teknis lalu lintas dan angkutan, teknis oprasional pembinaan dan pengembangan pos dan telekomunikasi.
3. Melaksanakan pelayanan teknis adminitrasi, meliputi administrasi umum, keuangan, program serta administrasi kepegawaian.

**3.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.**

tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2001 antara lain :

1. Memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan dinas perhubungan dalam bidang teknis prasarana, teknis lau lintas dan angkutan, teknis oprasional, pembinaan pos dan telekomunikasi.
2. Menetapkan rencana strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas perhubungan.
3. Menyusun rencana dan program kerja dinas perhubungan sesuai dengan kebijakan walikota.
4. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kerja bawahan.
5. Mendatangani konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan tugas yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja dilingkungan dinas perhubungan.
7. Melaksanakan hubungan kerja dengan intansi terkait lainya.
8. Membangun dan memberikan motivasi serta bimbingan kepada bawahan dalam rangka peningktan produktifitas kerja.
9. Memberikan informasi, sarana dan pertimbangan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas dinas perhubungan kepada walikota.
10. Melaporkan serta mempertangung jawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada walikota melalui sekertaris daerah.
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

**3.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Dinas Teknis Sarana.**

Tugas pokok dan fungsi Kepada Sub Teknis Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung berdasarakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 antara lain :

1. Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan sub dinas teknis sarana dalam bidang pengujian kendaraan, pendaftaran kendaraan dan perbengkelan.
2. Menyusun rencana dan program kerja sub dinas teknis sarana sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala dinas perhubungan.
3. Menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis kegiatan pengujian kendaraan, pendaftaran, dan pengaturan perbengkelan kendaraan.
4. Malaksanakan pengumpulan dan pengolahaan data kegiatan teknis sarana perhubungan.
5. Melaksanakan pengujian kendaraan, pendaftaran, dan pengaturan perbengkelan.
6. Menyiapkan dan membuat konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangan dan atau atas intruksi / disposisi kepala dinas.
7. Mendatangkan konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan tugas yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Melaksanakan kordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dilingkungan dinas perhubungan dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas-tugas dinas.
9. Membina dan memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk berkerja secara efektif dan efesien.
10. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala dinas dan atau kepada unit kerja lain dilingkungan dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyerengaraan tugas-tugas dinas.
11. Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas dilingkungan sub dinas teknis sarana.
12. Mempertangung jawabakan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada kepala dinas perhubungan.

**3.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pengujian.**

Tugas pokok dan fungsi dari kepala seksi pengujian di Dinas Perhubungan Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2001 antara lain :

1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan seksi pengujian kendaraan pada sub dinas teknis sarana dibidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengujian kendaraan.
2. Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja seksi pengujian kendaraan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala sub dinas teknis sarana.
3. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengujian kendaraan.
4. Mengumpulkan dan mengelola data pengujian kendaraan.
5. Melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan.
6. Melaksanakan pemantuan dan pengendalian kegiatan pengujian kendaraan.
7. Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk berkerja secara efesien dan efektif.
8. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala sub dinas teknis sarana sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Mengevaluasi, memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tangungjawabnya.
10. Mempertangung jawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada kepala sub dinas teknis sarana.

**3.1.9 Informan Penelitian**

**Tabel 2.1
Informan Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Informan** | **Informasi Yang Dibutuhkan** | **Jumlah** **Informan** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| 1 | Kepala Bidang Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung | Untuk mengetahui sejauhmana tindakan pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Dareah no 16 Tahun 2012 Tentang Penyenglengaraan dan Retribusi Perhubungan dengan menyediakan sarana dan prasaran terkai peraturan tersebut. | 1 |
| 2 | Kepala Bidang Lalulintas dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung | Untuk mengetahui sejauhmana Pemerintah melaksanakan kegiatan lalu lintas, ksusunya bagi pesepdah di Kota Bandung. | 1 |
| 3 | Seksi Manajemen dan Rekayasa lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Bandung | Untuk Mengetahui sejauhmana manajemen lalu lintas Kota Bandung, khusnya dalam masalah lajur sepeda dan *Bike Sharing* Kota Bandung. | 1 |
| 4 | Kepala Bidang Oprasional Dinas Perhubungan Kota Bandung | Untuk mengetahu sejauhmana sistem operasional Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya khsusnya dalam upaya penyelenggaraan perhubungan | 1 |
| 5 | Penjaga *Shelter Bike Sharing* Kota Bandung | Untuk Mengetahui sejauhmana fasilitas *Bike Sharing Kota* Bandung digunakan oleh masyarakat serta sejauhmana perawataan dan sistem kerja *Bike Sharing*. | 2 |
| 6 | Mayarakat Di daerah Kecamatan Tamansari  | Untuk Mengetahui sejaumana masyarakat mengunakan fasilitas Bike Sharing Kota Bandung dalam aktivitas kesehariannya. | 15 |
| 7 | Masyarakat Di sekitar taman flexi  | Untuk Mengetahui sejaumana masyarakat mengunakan fasilitas *Bike Sharing* Kota Bandung dalam aktifitas kesehariannya. | 15 |
|  | Jumlah  |  | 36 |

**3.1.10 Tingkat Pendidikan Pegawai**

 Data dari Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tahun 2011, mencatat bahwa jumlah kepegawaian intansi berjumlah 514 orang yang terdiri dari, 491 pegawai laki-laki dan 23 pegawai perempuan.Jumlah pegawai bisa dilihat dari uraian tabel berikut ini :

**Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Dinas Perhubungan Kota Bandung**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
| 1 | S-3 | 1 |
| 2 | S-2 | 10 |
| 3 | S-1 | 50 |
| 4 | D-IV | 2 |
| 5 | D-III | 10 |
| 6 | SMA | 357 |
| 7 | SMP | 40 |
|  | Jumlah | 514 |

**Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung**

**3.1.11 Landasan Hukum Pengelolaan *Bike Sharing***

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 16 Tahun 2012 tentang penyelengaraan perhubungan dan retribusi perhubungan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait pada pragraf 9 tentang fasilitas pesepedah pasal 32, Pemerintah Daerah dapat membangun fasilitas pesepedah berupa jalur khusus dan shelter sepedah. Pada pragraf 11 tentang kerjasama pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung lalu lintas dang angkutan jalan, pasal 36 ada dua point :

1. Pemerintah Daerah dapat berkerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan dalam fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
3. Lajur sepedah.
4. Sepedah gratis dan/atau sewa.
5. Tempat penyebrangan pejalan kaki.
6. Fasilitas perlengkapan jalan.
7. Fasilitas pemberentian dalm fasilitas khusus bagi penyandang cacat, lanjut usia/atau orang sakit.

**3.2 Metode Penelitian**

Bab ini akan menguraikan tentang pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini serta tentang alasan dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, selain itu juga akan dijelaskan mengenai metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya diikuti oleh penjelasan tentang alat yang akan dipergunakan dalam penelitian serta subjek penelitian. Penutup uraian di dalam bab ini adalah penjelasan mengenai tahapan prosedur penelitian (persiapan dan pelaksanaan penelitian) serta prosedur analisis data.

**3.2.1 Metode Penelitian.**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau biasa disebut sebagai metode peneitian naturalistik menurut Nasution dalam bukunya Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif (1996 : 2) bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Karena kebenarannya itu tidak lebih kompleks daripada yang diduga.

Pengalaman manusia begitu kompleks sehingga tidak dapat diikat oleh satu teori, menurut post positifisme atau naturalistik teori harus berguna, “*open minded, non dogmatic*, *and must be grounded*”. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema yang umum dan menafsirkan data.

Metode kualitatif peneliti dapat mendeskripsikan secara benar dan mendalam tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2012 Tentang Penyelengaaraan Perhubungan dan Retribusi Perhubungan pada Dinas Pehubungan Kota Bandung (studi kasus pelaksanaan *bike sharing* di Kelurahan Tamansari).

Sementara itu pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berusaha memahami gejala tingkah-laku manusia menurut penghayatan si individu sebagaimana individu tersebut mengalaminya melalui panca indarnya (Patton, 1990) pendekatan kualitatif ini didasari oleh asumsi bahwa individu dapat mengetahui hal-hal yang dialaminya hanya dengan mengikuti persepsi dan arti-arti yang membangkikan kesadaran individu. Jadi ada dua implikasi dari pernyataan ini yaitu : (Patton, 1990)

1. Fokus penelitian kualitatif adalah apa yang dialami individu dan bagaimana individu menginterpretasikan dunia.
2. Pendekatan ini merupakan cara untuk mengetahui apa yang dialami oleh individu lain terutama dengan mengalaminya sendiri. (menunjukan pentingnya *participant observation*)

Pendekatan kualitatif, teori tidak dipaksakan untuk mencari hubungan yang pasti antar variabel melainkan lebih ditunjukan untuk mencari dinamika masalah (Banister, Burman Parker, Taylor & Tindall, 1994). Dengan melihat masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini, maka pendekatan kualitatif dirasakan lebih tepat untuk digunakan. Hal ini mengingat bahwa suatu lembaga atau organisasi yang memiliki tujuan bersama untuk mencapai hal yang dituju tentunya pengawasan merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus dan bukan merupakan suatu keadaan yang statis.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana Pelaksanaan yang dilakukan dilapangan dengan berbagai permasalahan yang ada tentunya dengan menggunakan metode kualitatif ini akan lebih mudah mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Menurut Patton (1990) pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan informasi yang mendetail dan kaya sehingga memungkinkan untuk memahami suatu hal secara mendalam.

Pendekatan kualitatif merupakan metode yang baik untuk memberikan gambaran tentang suatu penelitian yang berorientasi pada penemuan (Barker, Pistray, Elliott, 1994). Bila dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif maka pendekatan kualitatif akan menghasilkan laporan yang lebih mudah dimengerti karena mudah dibaca dan tidak melibatkan serangkaian rumus-rumus matematis.

Nasution dalam bukunya Metode penelitian Naturalistik-Kualitatif (1996:2) juga ada 16 ciri penelitian kualitatif :

1. *Natural Setting*

Peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar, sebagaimana adanya, berhubungan dengan situasi dan orang yang ada sekitarnya.

1. Peneliti sebagai instrumen penelitian.

Ia yang menjadi *key instrumen* karena ia yang melakukan wawancara tdk berstruktur sendiri dan biasanya peneliti seringnya hanya membawa buku catatan.

1. Sangat deskriptif

Peneliti diusahakan untuk mengumpulkan data deskriptif yang banyak yang dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.

1. Mementingkan proses maupun produk

Penenliti memperhatikan bagaimana perkembangan terjadinya sesuatu dilapangan.

1. Mencari makna

Metode ini berusaha memahami kelakukan manusisa dalam konteks yang lebih luas.

1. Mengutamakan data langsung atau *frist hand*

Peneliti langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan data dengan cara observasi dan wawancara

langsung.

1. Triangulasi

Informasi dari satu pihak harus dichek kebenarannya dengan cara memperoleh data dari sumber lainnya misalnyadari pihak ke 2,3 dan 4 dengan metode yang berbeda. Tujuannya agar mendapatkan data untuk mencegah subyektivitas data.

1. Menonjolkan rincian kontekstual

Peneliti mengumpulkan dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan hal yang diteliti.

1. Subjek yang diteliti dipandang sama derajatnya dengan peneliti

Tidak ada yang merasa tinggi atau lebih tau, ia datang untuk belajar menambah pengetahuan dan pemahaman.

1. Mengutamakan perspektif emic

Mementingkan pandangan responden yakni bagaimana ia memandang dan menfsirkan dunia dari segi pendiriannya. Peneliti tidak mendesakan pandangannya sendiri.

1. Verifikasi

Hasil yang di peroleh lebih di percaya, peneliti justru mencari kasus-kasus yang berbeda atau yang bertentangan dengan apa yang ditentukan.

1. *Sampling purposif*

 Sampelnya biasanya sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian.

1. Mengutamakan audit trail

Mengikuti jejak dan melacak untuk mengetahui apakah laporan penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan. Dan dalam hal ini yang akan mengaudit ialah dosen pembimbing apakah sudah benar dalam menganalisis dan memahami metode penelitian.

1. Partisipasi tanpa menggangu

Memperoleh situasi yang natural peneliti jangan menonjolkan sedang melakukan observasi.

**3.2.2 Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian naturalistik dikumpulkan terutama oleh peneliti sendiri secara pribadi dengan memasuki lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang menggunakan teknik ini manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, data yang akan dikumpulkan, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu di kembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tak pasti dan jelas itu tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri satu-satunya yang dapat menghadapinya.

Mengapa peneliti sebagai instrumen utama karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

* 1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian. Tidak ada instrumen lain yang dapat bereaksi dan berinteraksi terhadap demikian banyak faktor dalam situasi yang senantiasa berubah-ubah.
	2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
	3. Tiap situasi merupakan suatu keseluruhan. Tidak ada suatu intrumen berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.
	4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat di pahami dengan pengetahuan semata-mata. Untuk memahaminya kita sering perlu merasakannya, menyelaminya berdasarkan penghayatan kita.
	5. Peneliti sebagai instrumen dapat langsung menganalisis data yang diperoleh.
	6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suaatu saat dan segera menggunakannya sebagai bahkan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau penolakan.
	7. Manusia sebagai instrument, respons yang aneh, yang menyimpang justru diberi perhatian.

**3.2.3 Teknik Analisis Data**

Nasutiondalam bukunya Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif (1996 : 63)menyatakan bahwa analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Teknik analisis data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut J.P. Spradley yang dikutip Nasution dalam bukunya Metode Naturalistik-Kualitatif (1996:63) mengatakan, bahwa data penelitian kualitaif bersifat deskriptif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata (utamanya kata-kata partisipan) atau gambar-gambar ketimbang angka.

**3.2.4 Proses Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan .

1. Analisis sebelum di lapangan

Analisis akan di lakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Perhubungan pada Dinas Pehubungan Kota Bandung (studi Kasus Pelaksanaan *bike sharing* di Kelurahan Tamansari).

1. Analisis selama di lapangan

 langkah ini peneliti akan melakukan analisis selama di lapangan menggunakan model Rossman dan Rallis yaitu analisis data di lakukan saat proses pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat proses wawancara berlangsung peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancara. Apabila jawaban belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan untuk menganalisis. langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langakah pertama adalah membangun gambaran umum atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-c*oding* data. Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya.
4. Terapkan proses *Coding* untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan di analisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Tunjukan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan.

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data sehingga dapat meneggaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya.

Keseluruhan diuji untuk kredibilitas transferabilitas dependabilitas konfirmabilitas

Dilaksanakan dalam batas masalah atau lain

Konteks Naturalistik

Manusia sebagai instrument

Pengetahuan tak terkatakan

Metoda-metoda kualitatif

**Ditata didalam**

`

Purposive sampling

**Diputar hingga jenuh**

Desain Sementara

Analisis data kualitatif

“Grounded theory”

 Dikaitkan dengan

Hasil yang disepakati

 Mengarah ke

Laporan Khusus

 Yang keduanya

Dapat ditafsirkan secara idiographik

Dapat diterapkan secara tentatif

Gambar 3.3 Analisis data dalam penelitian kualitatif

 (Arus Penelitian Naturalistic : Noeng Mohajir 1996:119)

**3.2.5 Fenomenologi**

Pembahasan tentang Fenomenologi diadopsi oleh Alfred Schutz Istilah fenomenologis untuk pertama kalinya digunakan oleh J.H. Lambert (1728-1777), dalam tulisannya “Neues Organon” (1764). Kemudian istilah itu pun dipakai oleh Kant, Hegel dan sejumlah filsuf lainnya. Fenomenologis memiliki arti serba berbeda. Pada perkembangannya, fenomenologis menjadi terkenal setelah Edmund Husserl (1859-1938) menggunakannya sebagai metode berpikir tepat yang khusus, yang lepas dari segala prasangka metafisis (Bakker, 1986).

 Tujuan utama fenomenologis adalah mempelajari bagaimana fenomenologi dialami dalam kesadaran, pikiran, dan dalam tindakan, seperti bagimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. Fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep-konsep penting, dalam kerangka intersubjektivitas. Intersubjektivitas karena pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Walaupun makna yang kita dapat ditelusuri dalam tindakan, karya, dan aktivitas yang kita lakukan, tetap saja ada peran orang lain di dalamnya. ( Engkus Kuswarno, 2009:2)

 Fenomenologi ingin mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia, dan makna yang ditempelkan padanya. Dengan demikian peneliti fenomenologi harus menunda proses penyimpulan mengenai fenomena, dengan menempatkan fenomena tersebut terlebih dahulu dalam tanda kurung. Atau dalam kata lain mempertanyakan dan meneliti terlebih dahulu fenomena yang tampak,

dengan mempertimbangkan aspek kesadaran yang ada padanya. (Engkus Kuswarno, 2009:35)

 Peneliti masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh subjek penelitian dalam kehidupan sehari-hari. Moleong mengungkapkan bahwa fenomelogi melihat sisi subjektif dari subjek penelitian atau dari sisi pandangan subjek penelitian.

 Penelitian fenomenologi percaya bahwa ada Neosis yang merupakan bahan dasar pikiran dan roh (*Mind and Spirit*), deskripsi Neosis adalah deskripsi subjektif, karena sudah ada pemberian makna padanya. Lawan dari neosis adalah neoma, yakni sesuatu yang diterima oleh panca indra manusia. Menurut Husserl neoma itu *faithfully and in the light of perfect self-evidence*. Dalam arti kata neoma itu tetap dan disertai bukti-bukti yang akurat (Engkus Kuswarno, 2009:43).

 Menganalisis perilaku actual manusia haruslah berdasarkan orientasi subjektif mereka sendiri, maka Alfred Schutz yang merupakan murid Husserl melalui karya klasiknya yang berjudul *The Phenomenologi of Social Word* (1972), tertarik dengan upaya penggabungan sejumlah pandangan fenomenologi dengan sosiologi yang menurutnya merupakan arus pengalaman (*Stream of* *experience)* dari reduksi fenomenologi pengetahuan manusia tentang dunia. Sebutan fenomenologi itu sendiri adalah merupakan cara dimana fenomena hal-hal yang kita sadari muncul kepada kita, dan cara yang paling mendasar dari pemunculannya adalah sebagai aliran pengalaman-pengalaman indrawi yang berkesinambungan yang kita terima melalui panca indra kita. Fenomenologi tertarik dengan dengan

mengidentifikasikan masalah ini dari dunia pengalaman indrawi yang bermakna kepada dunia yang penuh dari objek bermakna. Suatu hal yang semula terjadi di dalam kesadaran individual yang terpisah namun dalam interaksi menjadi kesadaran kolektif. (Ian Craib;1992:128)

 Schutz menganggap manusia adalah sebuah kedasaran sosial yang menurutnya berlangsung dalam dua cara: **Pertama**: kesadaran untuk mengandaikan begitu saja kegiatan orang lain yang di alami bersama. **Kedua:** kedasaran memakai tipe-tipe yang diciptakan dan dikomunikasikan oleh kelompok-kelompok individu yang ada. Dalam pendekatannya Schutz memakai apa yang disebut sebagai piranti filsafat fenomenologi Edmund Husserl. Metode Husserl adalah memeriksa dan menganalisis kehidupan batiniah individu, yakni pengalaman-pengalamannya mengenai fenomena atau penampakan seperti yang terjadi dalam apa yang disebut arus kesadaran. Schutz menganggap manusia adalah makhluk sosial. Akibatnya kesadaran akan kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial.

 Fenomenologi mencoba mengiterpretasikan tindakan subjek yang diteliti dari sudut pandang subjek yang diteliti. Sehingga dapat dieksplorasi apa dan bagaimana keberadaan subjek penelitian diantara lingkungan sosialnya dengan memperhatikan sisi psikisnya. Memprioritskan emosi, perasan, pengatahuan dan pendapatnya tentang apa yang di teliti. Schutz menyebut manusia yang berperilaku tersebut sebagai “aktor”. Ketika seseorang melihat satu mendengar apa yang dikatakan atau diprbuat aktor, dia akan memahami (*understand*) makna dari tindakan tersebut.

Schutz, dan kaum fenomenologi, tugas utama analisis fenomenologi adalah merekonstruksi dunia kehidupan manusia “sebenarnya” dalam bentuk yang mereka sendiri alami. Realitas dunia tersebut bersifat intersubjektif dalam arti bahwa anggota masyarakat berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan melalui sosialisasi dan memungkinkan mereka melalukan interaksi atau komunikasi (Mulyana, 2001;63) Selain makna *intersubjektif*, dunia sosial, menurut Schutz, harus dilihat secara historis. Oleh karenanya Schutz menyimpulkan bahwa tindakan sosial adalah tindakan yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain di masa lalu, sekarang dan akan datang (schutz, 1972;17).

 Schutz selanjutnya menjelaskan bahwa melihat ke depan pada masa yang akan datang (*looking-forward into the future*) merupakan hal yang esensial bagi konsep tindakan atau *action (handeln)*.tindakan adalah perilaku yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan pada masa datang yang telah ditetapkan (*determinate*). Kalimat tersebut sebenarnya mengandung makna juga bahwa seseorang memiliki masa lalu (*pastness*).

 Tujuan tindakan memiliki elemen ke masa depan (*futurity*).dan elemen ke masa lalu (*pastness*). Untuk menggambarkan bahwa tujuan suatu tindakan sosial seseorang cukup kompleks, maka Schutz meminjam istilah tata bahasa, dengan menyebut *in the future perfect tense (modo futuri exacti)*. Sementara itu, suatu tindakan dapat berupa “tindakan yang sedang berlangsung” (*the action in progress*), dan “tindakan yang telah lengkap” (*the completed act*). Dengan meminjam istilah dari Heidegger, Schutz menyebutkan bahwa “*the completed act thus picturedin the*

*future perfect tense as the project (Entwurf) of the action”*. Apa yang disebut sebagai suatu “proyek”, Schutz menjelaskan: “*is the act which is the goal of the action and which is brought into being by the action”* (Schutz, 1972:20).

Proyek adalah sebuah makna yang rumit atau makna yang kontekstual. Oleh karenanya, untuk menggambarkan keseluruhan tindakan seseorang, perlu diberi fase. Dan fase diusulkan Schutz diberi nama tindakan *in-order-tomotive (Um-zu Moti)* yang merujuk pada masa yang akan datang dan tidakan because-motive (Wil-Motiv) yang merujuk pada masa lalu. Dia mencontohkan, jika seseorang membuka payung ketika hujan turun, maka motif pertama ( motif untuk ) akan berupaya pernyataan “ menjaga baju tetap kering” sedangkan motif kedua (motif–sebab) dengan melihat pengalaman dan pengetahuan sebelumnya tentang bagaimana akibatnya pada baju jika hujan tanpa payung, misalnya digambarkan sebagai pernyataan “agar baju tidak basah” ( SCHUTZ), 1972: 20-21).

Edmund Husserl (1859-1938), dianggap sebagai pendiri fenomenologi, yang berusaha mengembangkan sebuah metode untuk mengemukakan kebenaran melalui kesadaran terfokus. Istilah yang digunakan Husserl untuk menggambarkan proses ini adalah reduksi fenomenologis atau *epoche*, yang merupakan eliminasi sistematis dan hati-hati dari setiap faktor subjektif yang masuk ke dalam pengalaman murni seseorang tentang sesuatu. Ketika ini sudah efektif berjalan, kesadaran seseorang pada pengertian kebenaran, seperti yang Husserl sebut sebagai *ego transendental* atau kesadaran yang murni. Ini berkaitan dengan kebenaran essensial dari suatu kehidupan sosial ( Nina Syam, 2009:169).

Fenomenologi sosial, filsafat Schutz memberikan sandaran bagi gerakan kontruksionisme sosial. Hal ini merupakan sebuah bagian penting dari filsafat relativisme sosial, yang banyak berlaku dalam teori komunikasi. Schutz juga, menunjukkan banyaknya cara dimana komunitas-komunitas manusia berbeda dan pengertian-pengertian yang dipertemukan oleh bermacam-macam orang. Gagasan-gagasannya telah mendatangkan dampak bagi teori-teori tentang interpretasi budaya.

Schuzt, dan pemahaman kaum fenomenologis, tugas utama analisis fenomenologis adalah mengkonstruksi dunia kehidupan manusia ”sebenarnya” dalam bentuk yang mereka sendiri alami. Realitas dunia tersebut bersifat intersubjektif dalam arti bahwa anggota masyarakat berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan melalui sosialisasi dan memungkinkan mereka melakukan interaksi atau komunikasi. (Engkus Kuswarno : 2009:110)

**3.3 Keabsahan Data**

**3.3.1 Kredibilitas**

Ada beberapa cara dalam meningkatkan kredibilitas data terhadap data hasil penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut :

Perpanjang pengamatan perpanjang masa pengamatan memungkinkanpeningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa menguji informan dari

informan dan untuk membangun kepercayaan para informan terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri. Peningkatan ketekunan, eningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka akan di peroleh kepastian data mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah no 16 Tahun 2012 Tentang Penyelengaaraan Perhubungan dan Retribusi Perhubungan pada Dinas Pehubungan Kota Bandung (studi Kasus Pelaksanaan *bike sharing* di Kelurahan Tamansari).

Triangulasi, Nasution dalam bukunya Penelitian Kualitatif (1996:151)Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema secara koheren. tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau pendapat dari partisipan akan menambah validitas penelitian

**3.4 Studi Pustaka**

yaitu teknik pengumpulan data dimana informasi yang didapat berdasarkan penelaahan literatur dan referensi dari berbagai data sekunder yang bersumber dari buku-buku, artikel, dokumen, dan laporan yang berupa jurnal atau hasil catatan penting lainnya tentang hal-hal yang berkaitan tentang masalah penelitian. Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada objek yang akan di teliti yaitu dengan teknik-teknik sebagai berikut:

**3.4.1 Wawancara.**

**Nasution** dalam bukunya **Metode Penelitian naturalistik-Kualitatif (1996:69)** menyatakan bahwa wawancara adalah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Pada wawancara penelitian dihadapkan kepada 2 hal. Pertama, kita harus secara nyata mengadakan interaksi dengan responden. Kedua kita menghadapi kenyataan, adanya pandangan orang lain yang mungkin berbeda pandangan kita sendiri.

Data yang dikumpulkan adalah data verbal dan non verbal. Pada umumnya yang diutamakan ialah data yang verbal yang diperoleh melalui percakapan dan tanya jawab. Data non verbal tidak kurang pentingnya. Hal semisal ucapan seseorang sering disertai oleh gerak-gerik badan, tangan atau perubahan wajah ini yang menjadi pertimbangan peneliti mungkin saja antara ucapan dan gerak tubuh tidak sesuai dengan kenyataannya, melakukan wawancara sangat di pertimbangkan sekali perspektif emic yang mana perspektif ini mempertimbangkan keterangan dari responden jadi dalam melakukan wawancara peneliti cukup untuk tidak terlalu jauh mempengaruhi responden dalam menceritakan tentang yang di alami. **Nasution** dalam bukunya **Metode Penelitian naturalistik-Kualitatif (1996:69)** menyatakan bahwa wawancara adalah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Pada wawancara penelitian dihadapkan kepada 2 hal. Pertama, kita harus secara nyata mengadakan interaksi dengan responden. Kedua kita menghadapi kenyataan, adanya pandangan orang lain yang mungkin berbeda pandangan kita sendiri.

Data yang dikumpulkan adalah data verbal dan non verbal. Pada umumnya yang diutamakan ialah data yang verbal yang diperoleh melalui percakapan dan tanya jawab. Data non verbal tidak kurang pentingnya. Hal semisal ucapan seseorang sering disertai oleh gerak-gerik badan, tangan atau perubahan wajah ini yang menjadi pertimbangan peneliti mungkin saja antara ucapan dan gerak tubuh tidak sesuai dengan kenyataannya, melakukan wawancara sangat di pertimbangkan sekali perspektif emic yang mana perspektif ini mempertimbangkan keterangan dari responden jadi dalam melakukan wawancara peneliti cukup untuk tidak terlalu jauh mempengaruhi responden dalam menceritakan tentang yang di alami. Awal wawancara biasanya dilakukan wawancara tak berstruktur. Tujuannya ialah memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam mengenai pandangan orang lain.

Urutan pertanyaan :

1. Jangan mulai dengan hal-hal yang kontroversial atau sensitif yang dapat menimbulkan pertentangan.
2. Mulailah dengan hal-hal masa sekarang seperti pekerjaan, pengalaman atau tindakan.
3. Langsung menanyakan hal-hal yang mengenai pengetahuan atau ketrampilan responden dapat dipandang sebagai ujian dan merusak kesantaian suasana.
4. Jangan segera ditanya mengenai masa lampau responden.

Pendekatan dalam melakukan wawancara dapat dilakukan tiga macam pendekatan yakni:

1. Bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, kesantaian, tanpa pola atau arah yang ditentukan.
2. Menggunakan lembar berisi garis besar pokok-pokok, topik atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan.
3. Menggunakan daftar pertanyaan yang lebih terinci, namun bersifat terbuka yang telah di persiapkan lebih dulu dan akan diajukan menurut urutan yang tercantum.

Jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). wawancara mendalam ini sangat berharga terutama apabila masalah yang akan digali sifatnya kaya informasi. Pendekatan kualitatif biasanya memang menggunakan jenis wawancara mendalam (Nasution : 1996). Wawancara mendalam menurut Nasution (1996) adalah wawancara yang tetap menggunakan pedoman wawancara walaupun penggunaannya tidak seketat wawancara terstruktur. Pedoman wawancara tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka, yang sifatnya bebas, tidak terstruktur dan

mendalam. Tujuan dari menggunakan pedoman wawancara ini adalah untuk menjaga agar arah wawancara tetap sesuai dengan tujuan penelitian.

Bila dikaitkan dengan penggunaan pertanyaan-pertanyaan terbuka, maka wawancara mendalam merupakan wawancara tidak berstruktur (Nasution:1996) dimana pewawancara memiliki kebebasan untuk memvariasikan kata-kata dalam pertanyaan serta urutan pertanyaan selama hal tersebut tidak mengubah arah penelitian.

Selain itu juga memungkinkan responden untuk menjawab secara detail, sehingga ada kesempatan untuk mengekspresikan perasaan-perasaan, motif dan tingkah-laku secara spontan serta memungkinkan subyek untuk memperluas jawaban sehingga data yang diperoleh menjadi lebih dalam (Nasution: 1996) dengan demikian bentuk wawancara ini lebih fleksibel dan terbuka, serta memungkinkan dilakukannya penggalian data secara lebih mendalam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan untuk mengurangi respon-respon yang tidak jelas sehingga jawaban yang lebih tepat.

Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan. Proses pengumpulan data ini peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan melalui tanya jawab langsung dengan informan secara terbuka dan terus menerus dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah no 16 Tahun 2012 tentang penyelengaraan perhubungan dan retribusi perhubungan pada Dinas Pehubungan Kota Bandung (study kasus pelaksanaan *Bike Sharing* di Kelurahan Tamansari).

Informan utama yang di jadikan sebagai sumber dalam pengumpulan data ini adalah Kepala Sub Dinas Teknis Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung, Kepala Sub Dinas Teknik Pengujian, Koordinator Lapangan, Penjaga Shelter sepedah *bike sharing* Kota Bandung daerah Kecamatan Tamansari. Kekuatan dan kelemahan metode wawancara. Metode wawancara memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan, seperti metode-metode pengumpulan data lainnya. Adapun kekuatan utama penggunaan metode wawancara adalah adanya interaksi langsung antara pewawancara dan responden. (Strewart, dan Cash 1982).

Interaksi langsung ini memberikan fleksibilitas bagi pewawancara dalam mengurutkan pertanyaan dan menyusun kata-kata dalam setiap pertanyaan. Responden dapat dibantu dalam mengintrepretasi pertanyaan-pertanyaan pewawancara sehingga didapatkan jawaban yang tepat sesuai arah penelitian. Pewawancara juga dapat mengontrol jalannya wawancara dengan memfokuskan diri pada masalah-maslah tertentu dengan menggunakan teknik *probing* sehingga diperoleh kejelasan data.

Interaksi langsung antara pewawancara dan responden terdapat kesempatan untuk membangun hubungan secara terus-menerus. Terjalinnya *rapport*  antara pewawancara dan responden akan membangkitkan kerjasama dan rasa percaya yang terutama diperlukan dalam menggali masalah-masalah sensitif. Dengan demikian pewawancara memperoleh kesempatan untuk mendalami masalah dan mendapatkan data yang kaya.

Selain merupakan kekuatan utama dari proses wawancara, interaksi langsung antara pewawancara dan responden dapat juga menjadi kelemahan (Nasution:1996) proses wawancara ini membutuhkan waktu yang cukup banyak agar didapatkan data-data yang lengkap. Selain itu interaksi langsung antara pewawancara, data yang diperoleh serta proses analisa jawaban responden, dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur subyektif si pewawancara. Wawancara akan menghasilkan data yang kaya, bila informasi yang diperoleh lebih banyak dari informasi yang dibutuhkan maka akan timbul kesulitan dalam mengkelompokan dan menganalisanya.

Mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, perlu dibuat pedoman wawancara yang memuat topik-topik yang ingin diketahui si pewawancara sehubungan dengan tujuan penelitiannya serta hal-hal yang membutuhkan penggalian jawaban lebih lanjut (*Probing*) dengan demikian pedoman wawancara dapat menuntun jalannya wawancara sehingga data-data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian serta memudahkan pewawancara dalam melakukan pengkategorisasikan jawaban-jawaban responden (Patton : 1990).

Pedoman wawancara dibuat untuk menjaga agar wawancara tetap berlangsung sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu pedoman wawancara ini juga di pakai sebagai alat bantu dalam mengkategorisasikan jawaban subyek untuk kemudian mempermudah analisis. Pedoman wawancara disusun tidak saja berdasarkan tujuan penelitian tetapi juga sesuai dengan teori yang berkaitan dengan maslah dalam penelitian. Pedoman wawancara berisi topik-topik penting yang ingin diketahui oleh pewawancara sekaligus bentuk standard dari setiap pertanyaan yang ingin ditanyakan.

Data yang ingin diperoleh melalui pedoman wawancara ini akan terbagi dalam tiga bagian tujuannya untuk lebih memudahkan. Bagian yang pertama adalah data kontrol, yang mencantumkan tanggal, hari, tempat dan lamanya proses wawancara serta memuat data pribadi subyek penelitian. Bagian yang kedua berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka sehubungan dengan pengawasan pengelolaan parkir. bagian ketiga adalah bagian untuk mencatat hasil observasi yang mencakup observasi terhadap subyek dan observasi terhadap tempat berlangsungnya wawancara.

**3.4.2 Metode Observasi**

Nasution dalam bukunya Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, (1996:56) menyatakan bahwa teknik observasi langsung yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti mendokumentasikan kejadian-kejadian nyata, observasi tingkah laku dan lain-lain pada tangan pertama. Dasar observasi ialah pertanyaan yang diajukan peneliti terhadap lingkungan. Apakah yang diamati ? menurut J.P. Spradley, dalam tiap situasi sosial terdapat tiga komponen, yakni ruang (tempat), pelaku (aktor) dan kegiatan (aktivitas).

Pada penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada tempat atau objek penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah no 16 Tahun 2012 tentang penyelengaraan perhubungan dan retribusi perhubungan pada Dinas Pehubungan Kota Bandung (study kasus pelaksanaan *bike sharing* di Kelurahan Tamansari).

Pandangan lain dari beberapa ahli mengatakan bahwa untuk memperkaya data-data yang didapat dari hasil wawancara dapat dilakukan observasi

(Patton:1990). Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak dalam penelitian (Nawawi:1995). Observasi dapat dilakukan terhadap dua hal yaitu : terhadap subyek yang diwawancarai serta terhadap setting atau tempat dilakukannya wawancara. Pewawancara perlu mengobservasi tempat wawancara untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku serta informasi yang disampaikan subyek.

 Sedangkan observasi terhadap subyek sendiri dapat meliputi anatara lain istilah-istilah yang digunakan oleh subyek serta makna implisit yang terkandung dalam setiap pernyataan subyek: faktor-faktor seperti intonasi suara, penekanan pada informasi-informasi tertentu : faktor-faktor non verbal seperti gerak tubuh, penggunaan ruang anatara responden dan pewawancara serta kontak mata.

 Mengobservasi hal-hal tersebut dapat diketahui intensitas emosi subyek terhadap pengalaman-pengalamannya. Maka selanjutnya dapat memperkaya data yang diperoleh, sesuai dengan tujuan dilakukannya metode observasi sebagai penunjang yaitu untuk memberi gambaran yang cukup bagi pembaca sehingga pembaca dapat mengerti kejadian yang berlangsung.

**Tabel 3.1**

**Operasional Parameter**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Jenis Data** | **Teknik Pengumpulan Data** |
| Implementasi Kebijakan | 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan | 1. Realistis2. Jelas 3. Terukur | SekunderPrimerSekunder  | ObservasiWawancaraObservasi |
|  | 1. Sumberdaya
 | 1.Sumberdaya Manusia2.Sumberdaya Waktu3.Sumberdaya Financial | SekunderSekunderPrimer | Observasi & WawancaraObservasiWawancara  |
|  | 1. Karakteristik Agen Pelaksana
 | 1. Opini Publik2. Elite Politik3.Cakupan wilayah implementasi kebijakan | SekunderSekunderPrimer | WawancaraObservasi & WawancaraObservasi |
|  | 1. Sikap dan Kecenderungan (Disposition) para pelaksana
 | 1.Respons implementor2. Kognisi3.Intensitas disposisi implementor | PrimerPrimerSekunder | Wawancara & ObservasiWawancaraObservasi |
|  | 1. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
 | 1. Koordinasi2. Trasmisi3.Kejelasan Informasi | SekunderSekunderPrimer | ObservasiObservasiObservasi &Wawancara |
|  | 1. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
 | 1.Kekondusifan Lingkungan Eksternal 2. Budaya Politik | SekunderSekunder  | ObservasiObservasi |

**Sumber : Modifikasi peneliti berdasarkan Teori Implementasi *Meter and Horn* dalam Agustino (2014 : 121**

**3.4.3 Karakteristik Subjek**

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung. Alasan pemilihan subjek Dinas Perhubungan Kota Bandung dikarenakan Dinas Perhubungan yang langsung menangani Pelaksanaan *Bike Sharing* di Kota Bandung.

**3.4.4 Cara Pengambilan Subjek**

Subjek dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive* *sampling*, dimana tidak terdapat cara untuk memperkirakan kemungkinan dari masing-masing subjek agar terpilih sebagai sampel dan tidak ada keyakinan bahwa masing-masing subjek memiliki kesempatan yang sama untuk diplih menjadi sampel (Nasution:1996). Selain itu juga individu-individu yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah individu dengan karakteristik tertentu yang sudah ditentukan.

**3.4.5 Jumlah Subjek**

Penelitian kualitatif tidak ada aturan yang pasti dalam hal jumlah subyek penelitian. Hal ini tergantung pada tujuan penelitian itu sendiri serta jumlah waktu dan sumber-sumber lain yang tersedia. Biasanya penelitian kualitatif memang menggunakan sampel dalam jumlah yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, bahkan kadang-kadang hanya menggunakan satu responden saja (Nasution:1996). Sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif yakni untuk menggambarkan penghayatan individu terhadap suatu hal secara mendalam, maka dengan adanya satu responden saja, hal tersebut dapat dimungkinkan.

Informasi mendalam dari sejumlah kecil subyek akan sangat berrharga terutama untuk kasus-kasus yang kaya informasi (Nasution:1996). Seperti juga dalam melakukan pengawasan yang merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Sesuai dengan jenis wawancara yang akan dipergunkan dalam penelitian yaitu wawancara mendalam yang membutuhkan beberapa kali pertemuan, maka sampel dengan jumlah 5-10 subjek sudah dianggap tepat dan cukup memadai (Nasution:1996:12) pertimbangannnya bila jumlah subjek masih kurang memadai maka akan ditambah sesuai kebutuhan penelitian. Informan penelitian adalah sumber informasi utama yaitu orang yang benar - benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Pemilihan Subjek dilakukan dengan cara memilih informan yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diperlukan dan dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai sumber data berdasarkan atas subjek yang menguasai permasalahan, Adapun beberapa informan di dalam penelitian ini, antara lain:

* + - * 1. Kepela Bidang Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung
				2. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Bandung
				3. Kepala Bidang Oprasional Dinas Perhubungan Kota Bandung
				4. Seksi Bina Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bandung
				5. Pegawai yang memiliki peran menjaga *Bike Sharing*

**3.5 Prosedur Persiapan Penelitian**

Berikut ini adalah hal-hal yang digunakan peneliti sebagai persiapan sebelum penelitian :

1. Menyusun serangkaian pertanyaan yang akan digunakan sebagai pedoman wawancara.
2. Menghubungi beberapa kenalan untuk meminta bantuan mencarikan calon subyek sebagaimana diinginkan. Dengan cara ini peneliti berhasil mendapatkan 5 subyek yang sesuai dengan kriteria.
3. Setelah kelima subyek menyatakan kesediannya untuk menjadi responden kemudian peneliti mengatur jadwal pertemuan untuk melakukan wawancara. Dalam hal ini peneliti meminta kesedian subyek untuk menentukan waktu wawancara.
4. Mempersiapkan alat perekam untuk merekam data.

**3.6 Prosedur Pelaksanaan Penelitian**

Tahap-tahap pelaksanaan penelitian

1. Wawancara dilakukan mulai tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan 19 juni 2016. Lama wawancara berlangsung satu sampai dengan dua jam tiap subyek. Untuk beberapa subyek, wawancara dilakukan dua kali karena data yang diharapkan belum lengkap. Tempat berlangsungnya wawancara pada beberapa subyek adalah kantor namun ada juga yang dilakukan di pinggir jalan.
2. Saat menghubungi subyek dan sebelum memulai wawancara, peneliti memberi penjelasan kepada subyek sehubungan dengan tujuan penelitian, alasan mengapa subyek terpiliih menjadi responden dan kebebasan subyek dalam mengemukakan pendapatnya tanpa perlu merasa kuatir karena peneliti menjamin kerahasiaan indentitas subyek dan informasi yang diberikan. Peneliti juga meminta ijin pada subyek untuk menggunakan alat perekam.
3. Setelah memberikan penjelasan dan memperoleh persetujuan dari subyek mengenai penggunaan alat perekam, peneliti memulai wawancara dengan terlebih dulu mengajak subyek berbincang-bincang mengenai hal-hal yang bersifat umum dimana tujuannya adalah untuk membina *rapport*.
4. Setelah terjalin rapport, peneliti mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaaan dengan mengacu pada pedoman wawncara. Bentuk-bentuk pertanyaan yang diajukan peneliti tidak selalu baku dan berurutan tetapi disesuaikan dengan daya tangkap dan keterbukaan subyek. Dengan demikian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan merupakan pengembangan lebih lanjut dari jawaban subyek. Untuk memperoleh data yang optimal, peneliti berusaha mengarahkan situasi wawancara hingga merupakan perbincangan santai.

Peneliti juga melakukan *Probing* atas jawaban-jawaban yang menarik untuk digali lebih dalam guna memahami proses penyesuaian yang dilakukan subyek.

**3.7 Prosedur Pencatatan Data**

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, semua data yang disampaikan subyek pada peneliti direkam dengan menggunakan alat perekam sesuai persetujuan subyek. Data hasil wawancara yang berupa rekaman kemudian dibuat transkripnya dalam bentuk Verbatim agar memudahkan peneliti melakukan analisa kualitatif terhadap jawaban-jawaban subyek. Peneliti melakukan sendiri pembuatan transkrip dan hanya mencantumkan inisial subyek dalam setiap transkrip demi terjaminnya kerahasiaan indentitas subyek.

**3.8 Kemudahan dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Penelitian.**

Kehadiran peneliti sebagai seorang mahasiswa yang sedang bertugas mencari data untuk keperluan skripsi. Subyek tidak menganggap peneliti sebagai pihak luar maksudnya seperti LSM, wartawan dll sehingga tidak menghambat proses pengungkapan dirinya secara terbuka dan jujur sikap subyek terhadap peneliti sangat kooperatif, mereka sangat antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Bahkan ada beberapa subyek yang merekomendasikan rekan-rekannya untuk ikut menjadi subyek penelitian.

Tingkat pendidikan subyek dalam proses wawancara yang cukup tinggi (S1 dan Sekolah Menengah Keatas) juga memudahkan peneliti dalam proses wawancara. Hal ini menentukan dalam pemahaman subyek akan istilah yang digunakan peneliti dalam proses wawancara. Selain hal-hal tersebut diatas peneliti juga mengalami beberapa hambatan dalam melaksanakan Penelitian ini. melakukan wawancara dikantor tidak memberikan cukup keleluasaan bagi subyek dalam menjawab.

Terjadinya interupsi oleh pihak lain seperti, harus menerima telepon, dan lain-lain juga mengganggu konsentrasi subyek dan peneliti. Bila hal ini terjadi maka peneliti perlu menjelaskan kembali pokok pembicaraan yang terputus. Beberapa subyek sangat antusias pada topik-topik pertanyaan tertentu. Mereka sangat terpaku pada hal-hal tersebut sehingga menyulitkan peneliti untuk beralih ke topik lain.

**3.9 Prosedur Analisis Data**

Macam-macam cara yang dapat diikuti. Tidak ada satu cara tertentu yang dapat dijadikan pegangan bagi semua penelitian. Salah satu yang dianjurkan ialah mengikuti langkah-langkah berikut yang masih umum, yakni : Reduksi Data-Data yang disaring dipilah-pilah, mana yang terbawa, yang bukan data yang diteliti dan mana data yang diteliti (diperlukan) disusun secara sistematis.Display data Membuat atau menampilkan data yang telah direduksi secara rinci dan secara sistematis secara keseluruhan dengan jelas.

1. Mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Display data yang telah dibuat kemudian ditelusuri, lalu ditarik kesimpulan sambil diperiksa seccara detail dan kemudian hasilnya ditampilkan sebagai hasil pembahasan. Adapun sebagai kelengkapanatau idealnya suatu skripsi, kita mencoba, memetaforkan hasil penelitian tersebut dengan teori, dalam hal ini teori secara umum yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Tahap ini. unit-unit yang memiliki makna tertentu dapat dikelompokkan dalam beberapa ketegori yang berbeda.

1. Mencari pola-pola tertentu

Mengetahui gambaran utama yang tampil sambil melakukan evaluasi data (mencari kejelasan makna) dimana peneliti dapat kembali melakukan langkah-langkah sebelumnya.

1. Melakukan interpretasi

Menjelaskan dinamika tema-tema yang muncul. Pada penelitian kualitatif tidak terdapat banyak perbedaan anatara analisis dan intrepetasi. Penekanan pada tahap interpretasi ini adalah untuk menjelaskan dan mendapat pengertian tentang dinamika tema-tema yang muncul.

Mengacu pada tahap-tahap diatas, maka peneliti menempuh prosedur sebagai berikut:

1. Mencatat hasil wawancara dan observasi subyek kedalam bentuk verbatim.
2. Memilih data yang sesuai dengan pokok permasalahan dan mengkelompokannya menjadi unit-unit. Kemudian dibuat ringkasan wawancara berdasarkan unit-unit tersebut.
3. Data yang berupa unit-unit tersebut kemudian dikelompokan kembali menjadi kategori-kategori yang memiliki tema tertentu sesuai dengan pokok permasalahan.